

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan/sasaran program tahun 2017, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 tercermin dari pencapaian sasaran program sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017

No	Sasaran Program	Capaian IKU
1	Sasaran Program 1	IKU 1 Tercapai 109,33%
		IKU 2 Tercapai 105,45%
2	Sasaran Program 2	IKU 1 Tercapai 105,71%
		IKU 2 Tercapai 100%
		IKU 3 Tercapai 100%
3	Sasaran Program 3	IKU 1 Tercapai 100%
4	Sasaran Program 4	IKU 1 Tercapai 100%
5	Sasaran Program 5	IKU 1 Tercapai 100%
6	Sasaran Program 6	IKU 1 Tercapai 125%
		IKU 2 Tercapai 100%
		IKU 3 Tercapai 100%
		IKU 4 Tercapai 120%
		IKU 5 Tercapai 61,11%
		IKU 6 Tercapai 0%
7	Sasaran Program 7	IKU 1 Tercapai 100%
		IKU 2 Tercapai 100,04%
		IKU 3 Tercapai 125%
		IKU 4 Tercapai 140%
8	Sasaran Program 8	IKU 1 Tercapai 110,86%

Uraian ringkas hasil pengukuran dari delapan belas IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran program “Meningkatnya Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” diukur berdasarkan dua IKU sebagai berikut:
 - a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional capaian tahun 2017 sudah melebihi target;
 - b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi capaian tahun 2017 sudah mencapai target;
2. Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian” diukur berdasarkan tiga IKU sebagai berikut:
 - a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan capaian tahun 2017 sudah melebihi target;
 - b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
 - c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
3. Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional” diukur berdasarkan IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” dimana capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
4. Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur berdasarkan IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” dimana capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
5. Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur berdasarkan IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat” dimana capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
6. Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi” diukur berdasarkan enam IKU sebagai berikut:
 - a. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) capaian tahun 2017 sudah melebihi target;

- b. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
 - c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
 - d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1) capaian tahun 2017 sudah melebihi target;
 - e. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina capaian tahun 2017 belum mencapai target;
 - f. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina belum mencapai target.
7. Sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah” diukur berdasarkan empat IKU sebagai berikut:
- a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) capaian tahun 2017 sudah sesuai target;
 - b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) capaian tahun 2017 sudah melebihi target;
 - c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) capaian tahun 2017 sudah melebihi target;
 - d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) capaian tahun 2017 sudah melebihi target;
8. Sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP” diukur berdasarkan IKU Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) capaian tahun 2017 sudah melebihi target.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Kendala pencapaian sasaran program dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target IKU “Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari BUMD yang Dibina” pada tahun 2017 disebabkan antara lain belum optimalnya penanganan tingkat kebocoran air, rendahnya cakupan pelanggan dan permasalahan SDM. BPKP melakukan pembinaan peningkatan kinerja BUMD dalam bentuk evaluasi kinerja setahun sekali.
2. Tidak tercapainya target IKU “Persentase BLUD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari BLUD yang Dibina” pada tahun 2017 disebabkan antara

lain rendahnya capaian kinerja pada aspek Kebijakan dan Prosedur Kerja, aspek Pengelolaan SDM dan aspek Akuntabilitas Kinerja. Pada tahun 2017 BPKP melakukan evaluasi kinerja pada dua BLUD RSUD dengan hasil keduanya dengan predikat “Cukup Baik”, belum masuk kategori “Baik”.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain adalah:

1. Mendorong peningkatan kinerja dalam bentuk saran/rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja BUMD khususnya terkait tingkat kebocoran, cakupan pelanggan dan permasalahan SDM.
2. Mendorong peningkatan kinerja dalam bentuk saran/rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tata Kelola BLUD khususnya terkait aspek Kebijakan dan Prosedur Kerja, aspek Pengelolaan SDM dan aspek Akuntabilitas Kinerja.

---o0o---